BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL

No.33,2015

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
Tata, cara, alokasi, besaran, bagian hasil, pajak daerah, retribusi daerah, desa.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis yang disebut Seksi dan unsur kewilayahan yang disebut Pedukuhan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.

(2) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak daeran dan retribusi daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa

Pasal 4

(1) Jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.11.177.422.725,- (sebelas milyard seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
   a. Bagian hasil pajak daerah sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan milyard lima ratus juta rupiah); dan
   b. Bagian hasil retribusi daerah daerah sebesar Rp.2.677.422.725,- (dua milyard enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

(2) Penentuan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan diatur sebagai berikut :
   a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
   b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing pada tahun anggaran 2014.

Bagian Ketiga
Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa

Pasal 5

(1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa.

(2) Besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penggunaan Penerimaan dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 6

Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kelima
Pencairan

Pasal 7

Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pencairan tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu Desa, paling lambat bulan Juni 2015.
b. Pencairan tahap II sebesar 50% (empat puluh persen) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu Desa, paling lambat bulan Oktober 2015; dan

Pasal 8

(1) Permohonan pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati Bupati Cq. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan diketahui Camat.

(2) Permohonan pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahap I harus dilampiri :
   a. fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2015; dan
   b. fotocopy nomor rekening kas desa pada Bank Umum.

(3) DPPKAD selaku PPKD mencairkan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah langsung ke rekening kas desa.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 9

(1) Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Camat setiap semester.

(2) Laporan penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2015 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2015, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2015.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 MEI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 15 MEI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19591231 199603 1 017

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015

NO	DESA	BESARAN ALOKASI		ALOKASI TAHAP I		ALOKASI TAHAP II	
		PAJAK DAERAH	RETR. DAERAH	PAJAK DAERAH	RETR. DAERAH	PAJAK DAERAH	RETR. DAERAH
1	PONCOSARI	82,521,000	67,011,036	41,260,500	33,505,518	41,260,500	33,505,518
2	TRIMURTI	84,560,000	28,083,978	42,280,000	14,041,989	42,280,000	14,041,989
3	GADINGSARI	76,818,800	42,811,330	38,409,400	21,405,665	38,409,400	21,405,665
4	GADINGHARJO	73,007,000	23,406,496	36,503,500	11,703,248	36,503,500	11,703,248
5	SRIGADING	79,464,700	37,282,843	39,732,350	18,641,421	39,732,350	18,641,421
6	MURTIGADING	77,232,000	24,969,492	38,616,000	12,484,746	38,616,000	12,484,746
7	TIRTOMULYO	72,719,000	23,406,496	36,359,500	11,703,248	36,359,500	11,703,248
8	PARANGTRITIS	78,931,300	589,547,667	39,465,650	294,773,833	39,465,650	294,773,833
9	DONOTIRTO	78,218,700	29,697,482	39,109,350	14,848,741	39,109,350	14,848,741
10	TIRTOSARI	71,670,200	23,719,095	35,835,100	11,859,547	35,835,100	11,859,547
11	TIRTOHARGO	74,634,500	23,719,095	37,317,250	11,859,547	37,317,250	11,859,547
12	SELOHARJO	71,255,000	23,406,496	35,627,500	11,703,248	35,627,500	11,703,248
13	PANJANGREJO	79,766,800	23,719,095	39,883,400	11,859,547	39,883,400	11,859,547
14	SRIHARDONO	76,875,000	26,740,443	38,437,500	13,370,222	38,437,500	13,370,222
15	SIDOMULYO	78,938,600	26,178,763	39,469,300	13,089,381	39,469,300	13,089,381
16	MULYODADI	77,692,100	24,114,744	38,846,050	12,057,372	38,846,050	12,057,372
17	SUMBERMULYO	80,097,500	26,491,362	40,048,750	13,245,681	40,048,750	13,245,681
18	CATUHARJO	80,240,900	24,475,363	40,120,450	12,237,682	40,120,450	12,237,682
19	TRIHARJO	78,905,000	24,656,893	39,452,500	12,328,446	39,452,500	12,328,446
20	GILANGHARJO	85,122,000	27,663,686	42,561,000	13,831,843	42,561,000	13,831,843
21	WIJIREJO	79,908,000	27,963,490	39,954,000	13,981,745	39,954,000	13,981,745
22	TRIWIDADI	76,390,900	23,719,095	38,195,450	11,859,547	38,195,450	11,859,547
23	SENDANGSARI	83,743,000	24,656,893	41,871,500	12,328,446	41,871,500	12,328,446
24	GUWOSARI	97,349,000	32,233,448	48,674,500	16,116,724	48,674,500	16,116,724
25	PALBAPANG	101,484,000	26,500,545	50,742,000	13,250,272	50,742,000	13,250,272
26	RINGIN HARJO	87,246,000	23,719,095	43,623,000	11,859,547	43,623,000	11,859,547
27	BANTUL	129,800,000	58,204,181	64,900,000	29,102,090	64,900,000	29,102,090
28	TRIRENGGO	106,675,000	34,500,127	53,337,500	17,250,064	53,337,500	17,250,064
29	SABDODADI	86,893,000	24,344,293	43,446,500	12,172,147	43,446,500	12,172,147
30	PATALAN	89,301,000	24,656,893	44,650,500	12,328,446	44,650,500	12,328,446
31	CANDEN	80,667,700	24,337,753	40,333,850	12,168,876	40,333,850	12,168,876
32	SUMBERAGUNG	86,190,600	29,760,071	43,095,300	14,880,036	43,095,300	14,880,036
33	TRIMULYO	85,522,400	24,516,764	42,761,200	12,258,382	42,761,200	12,258,382
34	SELOPAMIORO	73,247,000	26,590,284	36,623,500	13,295,142	36,623,500	13,295,142
35	SRIHARJO	71,109,000	24,031,694	35,554,500	12,015,847	35,554,500	12,015,847
36	WUKIRSARI	76,001,000	24,969,492	38,000,500	12,484,746	38,000,500	12,484,746
37	KEBONAGUNG	71,382,000	23,406,496	35,691,000	11,703,248	35,691,000	11,703,248
38	KARANGTENGAH	70,797,000	23,406,496	35,398,500	11,703,248	35,398,500	11,703,248
39	GIRIREJO	69,816,000	24,079,039	34,908,000	12,039,520	34,908,000	12,039,520
40	KARANGTALUN	70,423,000	26,817,676	35,211,500	13,408,838	35,211,500	13,408,838
41	IMOGIRI	72,305,000	46,840,485	36,152,500	23,420,243	36,152,500	23,420,243
42	MANGUNAN	70,350,000	54,780,560	35,175,000	27,390,280	35,175,000	27,390,280
43	MUNTUK	70,808,000	24,031,694	35,404,000	12,015,847	35,404,000	12,015,847
44	DLINGO	70,803,000	25,029,499	35,401,500	12,514,750	35,401,500	12,514,750
45	TEMUWUH	70,250,000	24,031,694	35,125,000	12,015,847	35,125,000	12,015,847
46	TERONG	70,706,000	24,969,492	35,353,000	12,484,746	35,353,000	12,484,746
47	JATIMULYO	69,997,000	23,406,496	34,998,500	11,703,248	34,998,500	11,703,248
48	BATURETNO	201,437,000	26,795,183	100,718,500	13,397,592	100,718,500	13,397,592
49	BANGUNTAPAN	490,007,000	31,534,075	245,003,500	15,767,038	245,003,500	15,767,038
50	JAGALAN	84,064,000	23,719,095	42,032,000	11,859,547	42,032,000	11,859,547
51	SINGOSAREN	98,072,000	24,031,694	49,036,000	12,015,847	49,036,000	12,015,847
52	JAMBITAN	122,436,800	24,031,694	61,218,400	12,015,847	61,218,400	12,015,847
53	POTORONO	204,050,000	24,969,492	102,025,000	12,484,746	102,025,000	12,484,746
54	TAMANAN	174,542,000	24,344,293	87,271,000	12,172,147	87,271,000	12,172,147
55	WIROKERTEN	149,665,000	24,031,694	74,832,500	12,015,847	74,832,500	12,015,847
56	WONOKROMO	125,517,000	32,439,405	62,758,500	16,219,703	62,758,500	16,219,703
57	PLERET	102,781,000	27,515,805	51,390,500	13,757,902	51,390,500	13,757,902
58	SEGOROYOSO	73,594,000	24,031,694	36,797,000	12,015,847	36,797,000	12,015,847
59	BAWURAN	73,860,000	23,406,496	36,930,000	11,703,248	36,930,000	11,703,248
60	WONOLELO	70,904,000	24,031,694	35,452,000	12,015,847	35,452,000	12,015,847
61	SITIMULYO	131,078,000	24,656,893	65,539,000	12,328,446	65,539,000	12,328,446
62	SRIMULYO	105,401,000	46,864,732	52,700,500	23,432,366	52,700,500	23,432,366

NO	DESA	BESARAN ALOKASI		ALOKASI TAHAP I		ALOKASI TAHAP II	
		PAJAK DAERAH	RETR. DAERAH	PAJAK DAERAH	RETR. DAERAH	PAJAK DAERAH	RETR. DAERAH
63	SRIMARTANI	90,807,000	24,031,694	45,403,500	12,015,847	45,403,500	12,015,847
64	PENDOWOHARJO	133,853,200	25,282,091	66,926,600	12,641,045	66,926,600	12,641,045
65	TIMBULHARJO	207,067,000	26,704,959	103,533,500	13,352,479	103,533,500	13,352,479
66	BANGUNHARJO	289,624,000	26,532,488	144,812,000	13,266,244	144,812,000	13,266,244
67	PANGGUNGHARJO	271,042,000	26,845,087	135,521,000	13,422,544	135,521,000	13,422,544
68	BANGUNJIWO	260,756,000	25,282,091	130,378,000	12,641,045	130,378,000	12,641,045
69	TIRTONIRMOLO	190,228,000	43,663,168	95,114,000	21,831,584	95,114,000	21,831,584
70	TAMANTIRTO	326,850,000	26,532,488	163,425,000	13,266,244	163,425,000	13,266,244
71	NGESTIHARJO	347,230,000	28,837,745	173,615,000	14,418,872	173,615,000	14,418,872
72	ARGODADI	87,180,000	25,091,002	43,590,000	12,545,501	43,590,000	12,545,501
73	ARGOREJO	110,808,300	26,609,202	55,404,150	13,304,601	55,404,150	13,304,601
74	ARGOSARI	92,730,000	24,031,692	46,365,000	12,015,846	46,365,000	12,015,846
75	ARGOMULYO	136,581,000	24,969,482	68,290,500	12,484,741	68,290,500	12,484,741
JUMLAH		8,500,000,000	2,677,422,725	4,250,000,000	1,338,711,363	4,250,000,000	1,338,711,363

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI